



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## EMPAT AGENDA PRIORITAS PENDIDIKAN HASIL G20 EDUCATION WORKING GROUP

**Shanti Dwi Kartika**  
Peneliti Madya  
[shanti.kartika@dpr.go.id](mailto:shanti.kartika@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pertemuan Pertama Kelompok Kerja Pendidikan G20 (*First G20 Education Working Group-G20 EdWG*) telah berakhir pada 18 Maret 2022, di Yogyakarta. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari Pertemuan Pertama G20 EdWG tersebut. Adanya G20 EdWG menjadi momentum untuk mengatur ulang fokus pembangunan pendidikan di Indonesia dan menata sistem pendidikan nasional. Indonesia melalui G20 EdWG memimpin gerakan global untuk menata dan membangun kembali sistem pendidikan secara bergotong-royong, serta melakukan transformasi pendidikan. Hal ini mengingat pandemi Covid-19 memengaruhi sistem pendidikan di dunia, sehingga memperluas ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi dalam mengakses pendidikan berkualitas.

Pada G20 EdWG 2022 tersebut, negara-negara anggota G20 telah menyepakati agenda prioritas pendidikan. Agenda prioritas pendidikan tersebut merupakan komitmen bersama yang diharapkan dapat menjadi solusi bersama untuk bangkit dari situasi pandemi. Agenda prioritas pendidikan yang disepakati dalam G20 EdWG 2022, yaitu:

- pendidikan berkualitas untuk semua (*universal quality education*), yaitu akses yang lebih merata terhadap pendidikan yang berkualitas untuk semua;
- teknologi digital dalam pendidikan (*digital technology in education*), yaitu peningkatan akses dan pemanfaatan teknologi yang tepat untuk mengatasi kehilangan pembelajaran (*learning loss*) dan mengakselerasi kualitas pendidikan, sehingga terpenuhinya akses, kualitas, dan keadilan sosial di bidang pendidikan;
- solidaritas dan kemitraan (*solidarity and partnership*), yaitu kolaborasi dan gotong royong lintas negara serta lintas sektor untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan; serta
- masa depan dunia kerja pasca-Covid-19 (*the future of work post-Covid-19*), yaitu pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan kebutuhan dunia kerja pasca-pandemi Covid-19.

Keempat agenda prioritas pendidikan tersebut sejalan dengan salah satu target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Goals 2030/SDGs 2030*). Target dalam SDGs 2030 tersebut, yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Selain itu, sejalan juga dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan kondisi global saat ini yang masih dalam pandemi Covid-19. Karenanya, diperlukan pembangunan kembali sistem pendidikan yang tangguh dengan memanfaatkan TIK dan hiperkonektivitas, serta sinergisitas dengan dunia usaha.

Hasil pertemuan pertama G20 EdWG 2022 tersebut dimaksudkan untuk menciptakan proses saling belajar, memperkuat prinsip gotong royong di tingkat global, dan menyinergikan dunia pendidikan dengan dunia kerja. Hasil dari pertemuan pertama ini akan ditindaklanjuti dengan memperkuat konsensus dan semangat gotong royong pada G20 EdWG 2022 untuk pertemuan kedua pada 18 Mei 2022, pertemuan ketiga pada 22 Juni 2022, pertemuan keempat pada 25 Juli 2022, serta pertemuan tingkat menteri bidang pendidikan pada 12 September 2022.

## Atensi DPR

Agenda prioritas pendidikan hasil kerja G20 EdWG berkaitan dengan Komisi X DPR RI. Komisi X DPR RI dapat berperan melalui fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Dalam rangka fungsi legislasi, Komisi X DPR RI perlu melakukan revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sehingga ketiga undang-undang tersebut dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan komprehensif bagi transformasi sistem pendidikan di era digitalisasi serta kebutuhan dunia kerja. Selain itu, Komisi X DPR RI perlu mendukung implementasi agenda prioritas pendidikan tersebut dalam rangka fungsi pengawasan, dengan:

- memastikan implementasinya dalam koridor konstitusional dan kerangka regulasi pendidikan di Indonesia;
- mendorong pemerintah untuk membuat beberapa regulasi yang diperlukan, jika belum terakomodasi dalam hukum positif; dan
- memerintahkan pemerintah untuk membuat *blue print* dan *grand design* pendidikan dengan transformasi digital dan sinergisitas dunia kerja.

## Sumber

[www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id);  
[www.g20.org](http://www.g20.org);  
[www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id);  
*Media Indonesia*, 19 Maret 2022;  
[www.medcom.id](http://www.medcom.id);  
[www.jawapos.com](http://www.jawapos.com).



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Dian Cahyaningrum  
Rafika Sari  
Ariesy Tri Mauleny

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022